

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 25 Juli 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 10)	Kamis, 25 Juli 2019	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PUPR HADI SUCAHYONO: "Kami Fokus Destinasi Super Prioritas"	Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional. Untuk mengetahui program prioritas apa saja yang akan digarap pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Bisnis mewawancarai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono.
2	Media Indonesia (Halaman 2)	Kamis, 25 Juli 2019	Berita Foto	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status awas untuk 12 wilayah di Jawa Barat yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem akibat tidak diguyur hujan sama sekali. Penetapan status tersebut didasari atas analisis curah hujan dalam tiga bulan ke depan.
3	Media Indonesia (Halaman 2)	Kamis, 25 Juli 2019	Daerah Alami Darurat Kekeringan	Pemprov Jateng dan sejumlah pemda mengantisipasi dengan menyiapkan sumur baru, membangun embung, hingga menormalisasi sungai.
4	Media Indonesia (Halaman 2)	Kamis, 25 Juli 2019	ASN Selalu Memegang Prinsip Melayani dan Menguasai Teknologi	Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2018 ada harapan yang tinggi di 'pundak' mereka. Pasalnya, mereka merupakan penerus tugas aparatur sipil negara (ASN) pendahulu ataupun pensiunan yang telah membangun negeri dengan baik.
5	Media Indonesia (Halaman 4)	Kamis, 25 Juli 2019	Presidential Lecture Perbarui Cara Kerja CPNS	Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 untuk melayani masyarakat, bukannya minta untuk dilayani ketika sudah diangkat menjadi PNS.
6	Media Indonesia (Halaman 10)	Kamis, 25 Juli 2019	Negara Hadir lewat Kota Layak Pemuda	SETELAH sukses menggulirkan Kota Layak Anak, pemerintah terus menyosialisasikan pemberian gelar Anugerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Tahun ini program yang digulirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dilaksanakan untuk ketiga kalinya.
7	Media Indonesia (Halaman 11)	Kamis, 25 Juli 2019	Korban Bencana Sulteng masih Memprihatinkan	PENANGANAN pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih karut-marut. Masalah data dan keperdataan menyebabkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kelangsungan hidup warga korban gempa menjadi tidak pasti.
8	Kompas (Halaman 3)	Kamis, 25 Juli 2019	Wapres: ASN Jangan Antikritik	Wapres Jusuf Kalla mengingatkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar tidak antikritik saat menjalankan tugas pelayanan public.
9	Kompas (Halaman 5)	Kamis, 25 Juli 2019	RI-UEA Tanda Tangan 12 MOU	Beberapa kerja sama ekonomi yang ditawarkan, antara lain, pengembangan pariwisata Mandalika dan Danau Toba, serta proyek-proyek yang berkaitan dengan SDGs, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
10	Kompas (Halaman 10)	Kamis, 25 Juli 2019	Mafia Air Rugikan Petani	Sejumlah petani di Indramayu berebut air irigasi dengan membayar ke penjaga pintu air atau gagal panen. Praktik bertahun-tahun itu dibantah, petani dituding salah paham.

11	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 25 Juli 2019	Berita Foto	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri (kanan) dan Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).
12	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 25 Juli 2019	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM: Swasta Bisa Berpartisipasi	Kalangan swasta berpeluang untuk tetap bisa berpartisipasi dalam perusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) seiring dengan pembahasan Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang mengatur perusahaan sumber daya air lebih ketat.
13	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 25 Juli 2019	KELANCARAN JALAN TOL: Toko di Rest Area Bakal Ditutup	Tempat istirahat dan pelayanan atau rest area di jalan tol sering dirasakan menjadi salah satu penyebab macet saat terjadi lonjakan trafi k misalnya mudik Lebaran. Hal ini mendorong pemerintah berencana untuk menutup toko kemersial di tempat itu.
14	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Kamis, 25 Juli 2019	KEMBANGKAN TUJUH DESA WISATA: Pemprov NTT Bantu Bangun Cottage	Pemprov Nusa Tenggara Timur pada tahun ini mendorong pengembangan pembangunan pondok wisata atau cottage di tujuh wilayah.
15	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 25 Juli 2019	RUMAH SUBSIDI: Bank & Pengembang Minta Tambahan Kuota	Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semakin menipis, membuat pengembang dan bank penyalur kredit berharap ada tambahan kuota.

Judul	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PUPR HADI SUCAHYONO: “Kami Fokus Destinasi Super Prioritas”	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 10)		
Resume	Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin masih menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional. Untuk mengetahui program prioritas apa saja yang akan digarap pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Bisnis mewawancarai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono.		

► KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PUPR HADI SUCAHYONO

“Kami Fokus Destinasi Super Prioritas”

Bisnis, JAKARTA — Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin masih menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional. Untuk mengetahui program prioritas apa saja yang akan digarap pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Bisnis mewawancarai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono. Berikut petikannya:

Apa saja program prioritas BPIW pada tahun ini? Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya?

Ada terbagi dua. *Pertama*, yakni penyelesaian beberapa program yang belum selesai sesuai dengan Renstra [Rencana Strategis] dari 2015-2019. *Kedua*, adalah penyelesaian program yang menyangkut kebijakan terkini, yang muncul sebagai kebijakan baru, yang perlu diakomodasi.

Kami *kan* saat ini lagi gencarnya mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu untuk mendukung kawasan tematik. Misalnya, seperti pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional [KSPN], kawasan ekonomi khusus [KEK], kawasan perbatasan, dan lainnya. Kami sekarang arahnya ke sana.

Nah, yang menarik adalah BPIW yang sebenarnya di bawah Kementerian PUPR, saat ini tidak hanya menterpadukan jalan, sumber daya air, cipta karya dan perumahan semata, akan tetapi juga menjalin koordinasi sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya.

tentang pemindahan ibu kota?

Koordinasi dan sinergi juga dilakukan dengan Bappenas. Apalagi saat ini sedang *hot issues* mengenai pemindahan ibu kota negara. *Nah*, hal ini yang saya kategorikan sebagai bagian tugas yang kedua tadi, yakni tugas pokok untuk merespons hal-hal terkait perkembangan isu terkini.

Atau contoh lainnya seperti yang terbaru juga, saat Presiden Jokowi kunjungan ke Labuhan Bajo. *Kan* seperti kita tahu bahwa dari 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, ada empat KSPN yang menjadi super prioritas, yakni Toba, Borobudur, Lombok dan Labuan Bajo. *Nah*, atas arahan beliau, saat ini sedang kami keroyok *nih* yang empat KSPN super prioritas tadi itu, bersama sama dengan para kepala daerah.

Kalau terkait pemindahan ibu kota, rencana pengembangan infrastruktur wilayahnya seperti apa?

Kalau terkait pemindahan ibu kota negara, kami mengacu kepada Bappenas. *Kan* sekarang pilihannya tiga lokasi tuh, Kalimantan Tengah,

di sana.

Saat ini dari 12 kawasan strategis, ada empat di antaranya ditetapkan sebagai super prioritas. Bagaimana progresnya?

Pada prinsipnya, kami tetap menangani semua perencanaan untuk 12 KSPN itu, tapi memang belakangan kami fokus penyiapan kondisi infrastruktur untuk empat destinasi super prioritas itu hingga ke detail lengkapnya.

Jadi, kalau biasanya kami hanya sampai *basic infrastructure* secara reguler, tapi sekarang kami benar-benar menyiapkan untuk empat destinasi super prioritas itu sebuah perencanaan yang cukup detail. Misalnya, saat kunjungan Presiden Jokowi ke Labuan Bajo belum lama ini dan di sana ada arahan bahwa terkait pelabuhan di Labuan Bajo, harus dipisah kegunaannya, yakni antara untuk turis dan juga kargo, karena saat ini masih campur.

Jadinya, nanti pelabuhan yang lama itu kami benahi untuk dapat disandari *yacht* atau kapal pesiar. Karena Presiden minta Labuan Bajo harus jadi lokasi wisata premium, apalagi menyasar mereka yang terbiasa menginap di kapal pesiar.

Kemudian kalau arah masuk lagi, ada pasar. Tempat kuliner di sana kami benahi dari semula agak kumuh akan dijadikan semacam pasar rakyat yang sehat. Lalu geser ke bukit, kami buat kan gardu pandang. Jadi kami padukan antara kebutuhan aksesibilitas dengan *enjoy* dan atraksi.

Nah untuk proyek seperti itu kami garap keroyokan dan benar-benar fokus kepada detail. Kalau yang proyek lainnya, yang reguler, hanya sampai *basic infrastructure* saja seperti biasanya selama ini.

Kalau yang reguler, misalnya, kami punya lokasi seperti di Toraja, Mandeh, Wakatobi, Raja Ampat. *Nah*, kami masuk di sana juga, tapi

prioritas?

Karena pemerintah melihat tren jumlah turis yang datang ke empat destinasi ini, yakni Toba, Lombok, Borobudur, dan Labuan Bajo, cenderung terus meningkat. Jadi memang potensial sekali, antara investasi yang kami keluarkan dengan potensi devisa dari para turis itu akan berimbang. Jangan sampai kita *over investment*, tetapi turisnya tidak ada.

Jadi pengembangan infrastruktur pariwisata masih akan menjadi fokus 2020?

Iya, karena memang data menunjukkan bahwa untuk mendapatkan devisa paling cepat, sementara ini dari pariwisata. Dengan investasi yang tidak terlalu besar jika dibandingkan proyek pengembangan yang lain, tapi *return*-nya cepat.

Kendala apa saja yang selama ini dihadapi?

Klasiknya, kebutuhan pasti banyak, tapi kemampuan *budgeting* pemerintah terkadang terbatas. Tapi meski begitu, kami sekarang bisa campuran *kan*, ada yang dari bantuan, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha [KPBU] atau bahkan swasta. Jadi, misalnya, kalau kami nanti udah buka di Labuan Bajo, *kan* pelabuhannya, destinasinya kita perbaiki segala macam, nanti swasta seperti hotel, *travel agent*, dan lainnya bisa masuk juga. Jadi ini trigger investasi. Investasi APBN untuk memancing swasta masuk, KPBU masuk, bantuan luar negeri juga bisa masuk, jadi kami campur ini.

Pidato Presiden belum lama ini kembali menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur wilayah secara lebih merata. Bagaimana respons BPIW?

Kami kebetulan juga punya strategi wilayah pengembangan strategis. Kami di sini merencanakan ada 35 wilayah pengembangan strategis, dari

apakah sudah cukup baik atau butuh peningkatan?

Kebetulan kami saat ini ada forum antareselon satu, yang sudah terjalin baik. Tapi memang sekarang kesadaran beberapa daerah yang belum begitu *tune* dalam bersinergi. Harus ada kesamaan pandangan bahwa untuk membangun daerah tidak hanya mengandalkan APBN atau Kementerian PUPR saja, karena tidak bakal cukup. Caranya, kalau memang ada jalan kabupaten yang rusak, pakai APBD Kabupaten, kalau jalan provinsi yang rusak maka pakai APBD provinsi. Jadi, bisa dibayangkan, apabila sudah punya bandara bagus, jalan nasional bagus, tapi begitu masuk ke destinasi wisatanya di suatu desa atau daerah, ternyata jalan desanya rusak. Sementara itu tanggung jawab daerah juga.

Jadi pola pikir kepala daerah harus luas. Meski, saat ini juga memang di sejumlah daerah memiliki beberapa pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner seperti itulah yang perlu dipupuk, karena yang kita kerjakan adalah bentuk investasi jangka panjang.

Bagaimana upaya meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, badan terkait lainnya?

Kami saat ini sudah terbiasa dengan adanya forum koordinasi dengan eselon satu di luar Kementerian PUPR. Kalau di Bappenas dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional. Kalau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Dirjen Tata Ruang. Kalau Kemempar dengan Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Deputi Kelembagaan.

Selain itu, belakangan juga makin akrab dengan Badan Geologi. Karena kami juga harus menentukan aspek keamanan lingkungannya. Hal ini agar begitu kami melakukan perencanaan infrastruktur, sisi lingkungannya juga harus aman.

Misalnya, koordinasi sinkronisasi dengan Kementerian Pariwisata untuk hal menyangkut destinasi. Dengan Kementerian Perhubungan untuk yang terkait pelabuhan, bandara, dan lainnya. *Nah*, kami dukung jalan aksesnya, air baku dan sebagainya untuk pengembangan kementerian terkait itu.

Jadi, selain tetap melaksanakan fungsi keterpaduan secara internal dengan PUPR, kami juga koordinasi keluar dengan kementerian lain, termasuk Bappenas.

Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Bappenas? Apalagi saat ini juga sedang pembahasan

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nanti, begitu Bappenas selesai dan *fix* mengerucut pada satu lokasi, maka kita BPIW buru-buru harus menyiapkan perencanaan infrastrukturnya, bersama dirjen lain di Kementerian PUPR.

Akan tetapi, untuk pemindahan ibu kota, sekarang ini *kan* bola masih di Bappenas. Saat ini juga masih ada serial kegiatan *focus group discussion* yang masih dilakukan oleh Bappenas *kan*. Karena banyak aspek yang harus disiapkan untuk pemindahan ibu kota, tidak hanya soal fisik, tapi juga terkait kebudayaan, lingkungan, ekonomi dan lain lain, yang saat ini masih digodok

tidak akan sedetail proyek empat lokasi super prioritas tersebut.

Sampai saat ini apakah bakal ada tambahan lagi kawasan strategisnya?

Tadinya *kan* 10 KSPN, kemudian ditambah dua lagi yakni Mandeh dan Toraja, jadinya sekarang 12 kawasan. Namun dari 12 itu, Presiden mengarahkan agar empat di antaranya menjadi super prioritas dan sampai sekarang ini belum ada penambahan lagi.

Kanapa empat kawasan yakni Lombok, Borobudur, Toba dan Labuan Bajo menjadi super

Aceh sampai Papua. Plus wilayah pengembangan strategis kami yang terakhir adalah perbatasan dan pulau-pulau terluar. *Nah* itu respons untuk arahan Pak Jokowi tersebut.

Kami akan terus hadirkan pemerataan. Jadi tidak hanya di daratan Jawa Sumatra saja, tapi juga untuk pulau-pulau kecil terluar, misalnya, seperti Nias di Sumatra, Anambas Riau, di daerah Maluku juga banyak pulau terluar. Strategi pemerataan kami seperti itu dan bekerja sama dengan berbagai kementerian, karena kami juga tidak bisa melakukannya sendirian.

Sejauh ini, koordinasinya

Saat ini pemerintah juga mendorong agar swasta diharapkan turut terlibat. Sejauh ini sudah berapa besar kontribusi swasta?

Yang sudah jelas, swasta banyak yang investasi di jalan tol, apalagi air minum, karena di sektor itu return-nya bagus. Jalan tol bayar, air minum juga berbayar, apalagi air pasti dibutuhkan di mana-mana. Mudah mudahan ada sektor lain lagi yang dimasuki swasta.

Kalau dukungan anggaran dari pemerintah cukup tidak?

Kalau dukungan anggaran dari pemerintah, kebetulan di Kementerian PUPR stabil. Kalau lihat angkanya, setiap tahun di atas Rp100 triliun dari 2015.

Estimasi untuk pengembangan sejumlah kawasan strategis tadi, anggarannya masih cukup, tapi dengan catatan bahwa untuk super prioritas hanya empat lokasi tadi, sisanya 12 itu reguler.

Akan tetapi kalau nanti semuanya menjadi super prioritas, maka kami harus lebih banyak ajak swasta, bisa lewat skema KPBU. Jadi sementara *so far* masih *ter-manage* dengan baik.

Tujuan seperti apa yang Anda harapkan dari setiap hasil kerja BPIW?

Intinya *outcome*-nya yakni kesejahteraan masyarakat sekitar. Kalau infrastruktur itu media saja dan *outcome*-nya adalah kesejahteraan meningkat, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. *Nah* itulah tujuannya pembangunan agar semakin berkembang. 

Perwawancara: Puput Ady Sukarno, Fitri Sartina Dewi & Rivki Maulana

Menjalankan Tugas dengan Penuh Kebahagiaan

Puput Ady Sukarno & Fitri Sartina Dewi
redaksi@bisnis.com

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan perekonomian masyarakat akan terus dipacu pada masa pemerintahan kedua.

Sejumlah program prioritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut pun akan terus disiapkan, seiring dengan dampak signifikan yang telah dirasakan oleh masyarakat atas realisasi sejumlah proyek yang terbangun. Sejumlah proyek itu seperti jalan tol, bendungan, bandara, dan lainnya.

Seiring dengan keberhasilan pengerjaan sejumlah proyek tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun turut meningkat.

Buktinya, Kementerian PUPR mendapatkan penguasan untuk mengerjakan proyek infrastruktur, seperti pembangunan gedung sekolah, rehab gedung sekolah yang rusak, maupun pembangunan pasar.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Suchahyono menyatakan harus mulai bekerja di saat hari libur guna menyelesaikan program pemerintah.

"Memang kalau dilihat saat ini kepercayaan kepada pemerintah saya kira juga membesar. Lihat saja, sekarang ini kalau ada tugas bikin gedung sekolah, rehab sekolah, pasar, sekarang mintanya ke Kementerian PUPR," ujarnya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Pada sisi lain, kepercayaan itu juga harus dijawab dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang semakin baik, di tengah keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki BPIW.

"Saya sering bilang ke teman-teman bahwa kami ini ibarat sedang mendorong mobil, tapi mobilnya membesar sedangkan jumlah orang yang mendorong tidak bertambah. Jadinya ya harus keluar ekstra tenaga untuk mendorongnya," ujarnya.

Atas kondisi itu, dia terpaksa mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga saat libur akhir pekan. "Sabtu Minggu *bareng* Pak Menteri PUPR [Basuki Hadimuljono] ngantor, itu sudah biasa. Ya kami intinya semangat saja," ujarnya.

Dia menekankan kepada jajarannya agar selalu menjaga

kesehatan saat bekerja. Salah satu cara yang ditempuh dengan menikmati kuliner untuk asupan gizi tubuh.

"Kalau waktunya Roti Eddy buka, ya kami ke sana, atau nyebrang dikit ke restoran padang. Kalau malas keluar, ya pesan *online* tidak masalah. Jadi harus seimbang antara energi masuk dan energi keluar," ujarnya sambil tertawa.

Hadi selalu menegaskan bahwa dalam mengerjakan segala amanah dan tugas yang diberikan, harus dilakukan dengan penuh semangat. Dia selalu bisa mengerjakan segala tugas dengan penuh kebahagiaan karena juga didukung penuh oleh orang di sekitarnya.

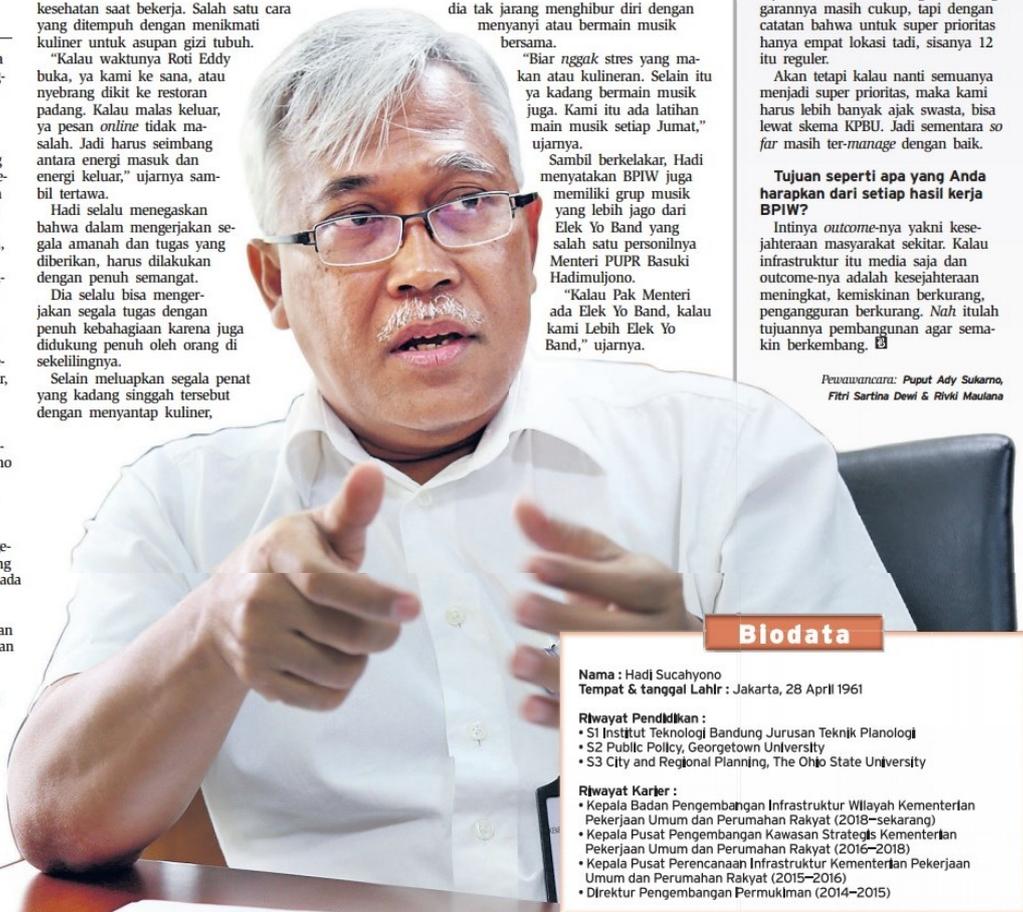
Selain meluapkan segala penat yang kadang singhah tersebut dengan menyantap kuliner,

dia tak jarang menghibur diri dengan menyanyi atau bermain musik bersama.

"Biar *nggak* stres yang makan atau kulineran. Selain itu ya kadang bermain musik juga. Kami itu ada latihan main musik setiap Jumat," ujarnya.

Sambil berkelakar, Hadi menyatakan BPIW juga memiliki grup musik yang lebih jago dari Elek Yo Band yang salah satu personilnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Kalau Pak Menteri ada Elek Yo Band, kalau kami Lebih Elek Yo Band," ujarnya.



Blodata

Nama : Hadi Suchahyono
Tempat & tanggal Lahir : Jakarta, 28 April 1961

Riwayat Pendidikan :

- S1 Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Planologi
- S2 Public Policy, Georgetown University
- S3 City and Regional Planning, The Ohio State University

Riwayat Karier :

- Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018-sekarang)
- Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016-2018)
- Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015-2016)
- Direktur Pengembangan Perumahan (2014-2015)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status awas untuk 12 wilayah di Jawa Barat yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem akibat tidak diguyur hujan sama sekali. Penetapan status tersebut didasari atas analisis curah hujan dalam tiga bulan ke depan.		



ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

POTENSI KEKERINGAN EKSTREM: Warga mengambil air di mata air kawasan persawahan di Desa Weninggalih, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status awas untuk 12 wilayah di Jawa Barat yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem akibat tidak diguyur hujan sama sekali. Penetapan status tersebut didasari atas analisis curah hujan dalam tiga bulan ke depan.

Judul	Daerah Alami Darurat Kekeringan	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Pemprov Jateng dan sejumlah pemda mengantisipasi dengan menyiapkan sumur baru, membangun embung, hingga menormalisasi sungai.		

Daerah Alami Darurat Kekeringan

Pemprov Jateng dan sejumlah pemda mengantisipasi dengan menyiapkan sumur baru, membangun embung, hingga menormalisasi sungai.

AKHMAD SAFUAN
 achmad_sapuan@mediaindonesia.com

MUSIM kemarau tahun ini membuat sejumlah daerah mengalami krisis air bersih hingga bencana kebakaran hutan. Sebanyak 12 dari 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah malah telah dinyatakan sebagai daerah darurat bencana kekeringan.

Kekeringan di Jawa Tengah ini, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tersebar di 267 desa di Kabupaten Jepara, Blora, Temanggung, Pematang, Cilacap, Brebes, Purworejo, Boyolali, Grobogan, Kebumen,

dan Banjarnegara. Dari 12 daerah darurat bencana itu, Kabupaten Grobogan menjadi daerah dengan wilayah terbanyak dilanda kekeringan, yakni 83 desa di 12 kecamatan.

Akibat lainnya ialah ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, puso atau gagal panen. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Klaten, Erni Kusumawati, mengatakan total luas tanaman padi yang kekeringan mencapai 2.017 hektare dan 880 hektare di antaranya puso.

"Untuk petani yang mengalami gagal panen, kami telah mengu-

payakan bantuan benih padi ke Kementerian Pertanian RI dan Pemkab Klaten," ujarnya, kemarin.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan pemerintah provinsi dan daerah telah meningkatkan bantuan air bersih di desa-desa yang terlanda kekeringan. "Pemprov Jateng dan pemda juga menyiapkan sumur-sumur baru, peminjaman pompa air, hingga membangun waduk, bendungan, embung, serta normalisasi sungai," tambahnya.

Tak hanya di Jawa Tengah, puluhan hektare sawah di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, juga mengalami kekurangan air akibat belum turunnya hujan dalam tiga bulan terakhir.

"Kalau dihitung, nilai kerugian bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sekarang petani menganggur karena tak bisa berbuat apa-apa," ujar Ketua Kelompok Tani Sejahtera, Kampung Jambelaer, Jamaludin.

Terkait darurat kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan dua langkah penanganan. "Kami akan melakukan pembagian air bersih, sedangkan langkah permanennya ialah membangun 16 titik sumur bor," kata Kepala BPBD Flotim, Paulus Igo Geroda.

Kebakaran hutan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan mengatakan sekitar 1,7 juta hektare hutan di Jawa Barat terancam kebakaran pada musim kemarau ini. Bahkan, sejumlah taman hutan lindung yang ada di provinsi itu sudah ditutup untuk mencegah terjadinya bencana.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa kemarin memerintahkan Dinas Kehutanan dan BPBD Provinsi Jatim untuk menangani kebakaran di lereng Gunung Panderman. Berlangsung sejak Minggu (21/7), kebakaran itu telah menghancurkan lebih dari 70 hektare hutan.

Kebakaran juga telah menghancurkan puluhan hektare lahan di lokasi wisata Bukit Cinta Wajirang di Kabupaten Lembata, NTT. (FB/WJ/BB/BN/JS/DY/RF/PT/LD/FL/UL/BY/AD/X-11)

Judul	ASN Selalu Memegang Prinsip Melayani dan Menguasai Teknologi	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2018 ada harapan yang tinggi di 'pundak' mereka. Pasalnya, mereka merupakan penerus tugas aparatur sipil negara (ASN) pendahulu ataupun pensiunan yang telah membangun negeri dengan baik.		

ASN Selalu Memegang Prinsip Melayani dan Menguasai Teknologi

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2018 ada harapan yang tinggi di 'pundak' mereka. Pasalnya, mereka merupakan penerus tugas aparatur sipil negara (ASN) pendahulu ataupun pensiunan yang telah membangun negeri dengan baik.

Kalla menekankan, syarat untuk bisa menjadi bangsa pemenang dan membawa negara maju dan berkembang adalah memiliki pemerintahan dan sistem birokrasi yang baik, disiplin, inovatif, dan berdaya saing di tengah dinamika persaingan antarnegara dan global.

la berharap ASN berpikir maju tentang berbangsa dan membangun pemerintahan untuk memakmurkan masyarakat dengan adil serta kesetaraan sosial. "Kemakmuran dapat dicapai kalau ekonomi merata serta memberikan pekerjaan yang banyak ke masyarakat. Sebagai pelayan maju tentang berbangsa dan membangun pemerintahan untuk memakmurkan masyarakat dengan adil serta kesetaraan sosial. "Kemakmuran dapat dicapai kalau ekonomi merata serta memberikan pekerjaan yang banyak ke masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat mereka harus siap ditempatkan di mana

saja didasarkan pada tekad pengabdian, bukan sentimen kedaerahan," ujar Kalla ketika memberi pengarahan dan pembekalan kepada ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2018. Hal itu diungkapkan pada acara Presidential Lecture 2019 bertemakan 'Sinergi untuk Melayani' bertempat di Gedung Istora Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

Kalla menyebut tentang sistem otonomi daerah yang memberi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar berjalan semakin baik.

"Kalau Anda ditempatkan di daerah jangan tergantung ke pusat. Anda juga harus bersaing dengan daerah lain. Dalam masa reformasi dipahami adanya kebebasan pers, orang akan leluasa mengkritik. Anda leluasa harus terima kritik kalau Anda keliru. Apabila Anda tak berhasil, media akan mengkritik ke pusat. Anda juga harus bersaing dengan daerah lain. Dalam masa reformasi dipahami adanya kebebasan pers, orang akan leluasa mengkritik. Anda leluasa harus terima kritik kalau Anda keliru. Apabila Anda tak berhasil, media akan mengkritik Ada semua," ujar Kalla.

Menurutnya, ASN yang

berdedikasi dan profesional juga harus memberi motivasi ke masyarakat untuk bekerja sebaik-baiknya. Karena dalam sistem pemerintahan terjadi hubungan satu sama lain. Pemerintah memiliki punya kemampuan APBN/APBD. Itu diperoleh dari pajak, pajak diperoleh dari kemampuan pengusaha bekerja baik.

Begitu juga hubungan antara pemerintah dan dunia usaha harus terjalin dengan baik. Kalla menyebut dunia usaha menjadi penerus maju mundurnya bangsa di bidang ekonomi.

Tantangan ke depan, terangnya, ialah memperkuat daya saing, khususnya di bidang penguasaan teknologi. Itu ditentukan oleh kemampuan SDM untuk menghasilkan kreasi dan inovasi. Sementara sumber daya alam Indonesia yang kaya akan habis pada waktunya.

"Akhir-akhir ini kalau Anda baca banyak sumber industri kalah akibat persaingan. Semua dibutuhkan inovasi baru dalam kemajuan bangsa. Masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan kita Indonesia yang kaya akan habis pada waktunya.

"Akhir-akhir ini kalau Anda baca banyak sumber industri kalah akibat persaingan. Semua dibutuhkan inovasi baru dalam kemajuan bangsa. Masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan kita memberikan layanan baik kepada masyarakat, juga

tentu dalam sistem pelayanan ekonomi kita," terang Wapres.

Kalla juga mengingatkan bahwa 26 tahun lagi Indonesia akan berusia satu abad. Momentum tersebut sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa yang ingin mencapai kemajuan, baik melalui upaya bersama birokrasi, pengusaha, masyarakat. "Nasib bangsa akan makmur akan tergantung dari upaya kalian yang hadir di tempat ini. Belajarlah dari para senior, belajar pula dari kegagalan-kegagalan mereka. Pengalaman itu guru terbaik di masa kini dan yang akan datang untuk Anda bisa maju," tegas Kalla.

Sistem yang baik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin mengatakan Presidential Lecture 2019 kali ini merupakan kuliah umum yang kedua kalinya diberikan kepada CPNS yang telah lulus seleksi. Kuliah umum tersebut sebagai bekal bagi CPNS dalam menjalankan program prioritas untuk pertumbuhan RB). Syafruddin mengatakan Presidential Lecture 2019 kali ini merupakan kuliah umum kepada CPNS yang telah lulus seleksi. Kuliah umum tersebut sebagai bekal bagi CPNS dalam menjalankan program prioritas untuk pertumbuhan dan pembangunan.

Kegiatan ini diisi oleh tiga



Wapres Jusuf Kalla memainkan alat musik jembe bersama para CPNS didampingi Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Former Minister of Personnel Management of the Republic of Korea Pan Suk Kim di acara Presidential Lecture 2019.

pelembaga dari tokoh dalam dan luar negeri. Diharapkan melalui sesi *inspiring speaker*, CPNS dapat membuka wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan global dan era digital.

Tiga tokoh *inspiring speaker* ialah Former Minister of Personnel Management Republic of Korea Pan Suk Kim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Komisaris Utama NET TV Wishnutama.

"Kegiatan ini untuk memotivasi aparatur sipil negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Komisaris Utama NET TV Wishnutama.

"Kegiatan ini untuk memotivasi aparatur sipil negara menjadi aparat yang berkaliber dan berintegritas, me-

mahami visi pembangunan nasional pemerintah," terangnya.

Menurutnya, ASN tulang punggung birokrasi untuk menyiapkan generasi cerdas. "Yang siap bersaing memasuki era revolusi industri 4.0. ASN era digital adalah ASN yang adaptif dengan kemajuan digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi," ujar Syafruddin.

Kemenpan-RB di bawah kepemimpinannya akan membuat program-program ki era revolusi industri 4.0. ASN era digital adalah ASN yang adaptif dengan kemajuan digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi," ujar Syafruddin.

Kemenpan-RB di bawah kepemimpinannya akan membuat program-program sebagai upaya menciptakan birokrasi berwawasan global

yang didukung oleh sumber daya ASN yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu tujuannya adalah mencapai Smart ASN 2024 dan Indonesia Emas 2045.

Birokrasi 4.0 yang ia tekankan adalah yang fleksibilitas kerja, efisiensi pelayanan, percepatan layanan, dan akurasi pelayanan.

Pada kesempatan tersebut Kementerian PAN RB juga memberikan penghargaan kepada peserta CPNS 2018 dengan skor tertinggi dan peserta dengan usia termuda, masing-masing diraih oleh Siti Riza Azmiyati di BKKBN dan Arya Bagus Kevin Rajendra

Pada kesempatan tersebut Kementerian PAN RB juga memberikan penghargaan kepada peserta CPNS 2018 dengan skor tertinggi dan peserta dengan usia termuda, masing-masing diraih oleh Siti Riza Azmiyati di BKKBN dan Arya Bagus Kevin Rajendra di Kementerian PUPR. (Hym/ S1-25)



Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.



FOTO: FOTO MERKANI

Judul	Presidential Lecture Perbarui Cara Kerja CPNS	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 untuk melayani masyarakat, bukannya minta untuk dilayani ketika sudah diangkat menjadi PNS.		

**SINERGI
UNTUK
MELAYANI:**
Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diikuti 6.198 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema *Sinergi untuk melayani*.



Presidential Lecture Perbarui Cara Kerja CPNS

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 untuk melayani masyarakat, bukannya minta untuk dilayani ketika sudah diangkat menjadi PNS.

"Banyak PNS zaman dulu itu ingin dilayani, dihormati, diberi fasilitas yang lebih baik. Itu pikiran masa lalu yang sudah berubah," kata Wapres saat memberikan kuliah umum *presidential lecture* kepada CPNS di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.

Tugas melayani itu dapat dicerminkan sesuai dengan bidang tempat PNS itu bekerja, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, maupun Kementerian Dalam Negeri.

"Guru yang diangkat (PNS) melayani artinya mengajar dan mendidik generasi muda dengan ikhlas, dengan kemampuan yang baik. Pegawai Kemenkes melayani artinya ialah merawat, mendorong kesehatan masyarakat menjadi lebih baik."

Presidential Lecture 2019 merupakan kuliah umum yang kedua kalinya diberikan kepada CPNS yang telah lulus seleksi sebagai bekal bagi pegawai pemerintah dalam menjalankan program prioritas untuk pembangunan.

Menteri PAN-Rebiro Syafruddin menambahkan penyelenggaraan *presidential lecture* menjadi momentum bagi CPNS untuk memperbaiki

cara bekerja para birokrat. "Melalui *presidential lecture*, karakter dan cara pandang dalam bekerja para CPNS dimutakhirkan. Sebab arahan dari Wapres langsung diterima oleh para CPNS dan PNS sebagai mesin utama penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa."

Syafruddin mengatakan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 sebanyak 238.015 formasi untuk 76 kementerian/ lembaga dan 525 pemerintah daerah dan terisi sebanyak 180.624. Sebanyak 164.783 diisi dari formasi umum, 6.307 formasi cum laude, 1.808 disabilitas, 604 putra/i Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional.

Saat ini kebijakan strategis pembangunan SDM ASN bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Perencanaan ASN searah pembangunan nasional dan potensi daerah, kemudian rekrutmen dan seleksi berbasis komputer dan online, selanjutnya pengembangan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran ASN Corporate University, penilaian dan penghargaan kinerja, sistem merit dalam promosi mutasi dan rotasi, dan peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, fasilitas, serta jaminan hari tua. (Dro/P-1)

Judul	Negara Hadir lewat Kota Layak Pemuda	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 10)		
Resume	SETELAH sukses menggulirkan Kota Layak Anak, pemerintah terus menyosialisasikan pemberian gelar Anugerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Tahun ini program yang digulirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dilaksanakan untuk ketiga kalinya.		

Negara Hadir lewat Kota Layak Pemuda

SETELAH sukses menggulirkan Kota Layak Anak, pemerintah terus menyosialisasikan pemberian gelar Anugerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Tahun ini program yang digulirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dilaksanakan untuk ketiga kalinya.

Seperti diungkapkan Deputy Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Ni'am Sholeh, jika negara tidak hadir, pemuda juga mendapat ancaman serius, baik pada aspek pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menerima bonus demografi.

"Karena itu, pemerintah se-

patutnya melindungi generasi muda dari ancaman terorisme, radikalisme, dan zat adiktif yang dapat merusak generasi muda. Meski kebijakan perlindungan dan antisipatif itu tidak populis, pemerintah tetap harus melakukannya," tuturnya, di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Saat memberikan arahan kepada perwakilan 16 provinsi dan 8 kabupaten/kota terkait seleksi Anugerah Kabupaten/Kota Layak Pemuda 2019, Mas Ni'am menyatakan ada lima indikasi kabupaten/kota layak pemuda, di antaranya, regulasi kepemudaan, alokasi anggaran program kepemudaan, partisipasi anak muda dalam aparat sipil, penyediaan

sarana dan prasarana untuk pemuda dan indeks pembangunan pemuda.

"Kegiatan ini sudah berlangsung tiga tahun. Kami terus memperbaiki kekurangan yang ada," jelasnya.

Kemenpora, lanjut dia, juga menjalin kerja sama dengan Kemendagri. Kerja sama diharapkan mampu memotivasi kabupaten/kota mengambil peran untuk hadir dalam agenda yang besar ini.

"Anugerah Layak Pemuda ini tidak hanya untuk gengsi semata, tapi tanggung jawab dan upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Ada lima kategori yang diseleksi," tandas Mas Na'im.

Di sisi lain, sejumlah dae-

rah penerima Penghargaan Kota Layak Anak menyambut dengan antusias penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. "Ini keenam kalinya. Ini menjadi motivasi bagi pemkot untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak. Ke depan, kami akan terus melahirkan anak-anak berprestasi dan cerdas," ungkap Wali Kota Achmad Fahmi.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menilai penghargaan merupakan kepercayaan. "Ini memotivasi kami untuk berkomitmen kuat memberi perhatian besar kepada anak-anak." (HT/BB/DG/N-2)

Judul	Korban Bencana Sulteng masih Memprihatinkan	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 11)		
Resume	PENANGANAN pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih karut-marut. Masalah data dan keperdataan menyebabkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kelangsungan hidup warga korban gempa menjadi tidak pasti.		

Korban Bencana Sulteng masih Memprihatinkan

PENANGANAN pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih karut-marut. Masalah data dan keperdataan menyebabkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kelangsungan hidup warga korban gempa menjadi tidak pasti.

"Kami berharap pemerintah pusat tidak lepas tangan atas proses penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah. Jangan sampai karena hanya menjalankan fungsi asistensi, mereka membiarkan manajemen pengelolaan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi lamban dan karut-marut," papar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, kemarin.

Ia mengungkapkan kondisi masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian sangat memprihatinkan. Itu terjadi akibat gagalnya proses komunikasi dan hal-hal teknis di

lapangan.

Untuk itu, politikus asal Sulawesi Tengah ini memandang perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif, yakni evaluasi hambatan-hambatan teknis proses penanganan bencana. Selain itu, inventarisasi masalah yang timbul dari sejumlah proses tahapan bencana dari transisi ke pemulihan.

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden No 10 Tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Tugas pemerintah daerah ialah menyiapkan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

"Kalau prosesnya hanya menunggu dan menunggu hasil kerja teknis berdasarkan panduan dari Jakarta, proses tentu tidak akan sama

dengan ketika proses asistensi itu dilakukan secara faktual di lapangan. Yang dibutuhkan saat ini ialah bagaimana agar hambatan teknis tidak memengaruhi tertundanya hak para pengungsi," ungkap anggota Komisi VII DPR itu.

Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemerintah kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengajukan kebutuhan alat deteksi dini tsunami. Daerah itu membutuhkan karena sebagian wilayahnya berada di pantai selatan yang berpotensi dilanda tsunami, yakni Kecamatan Cipatujah dan Cicalong.

"Kami sudah mengajukan ke pemerintah pusat. Alat itu penting sehingga masyarakat bisa waspada jika terjadi gempa yang kemudian menyebabkan tsunami," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya Wawan R Efendi. (MT/Opn/AD/N-2)

Judul	Wapres: ASN Jangan Antikritik	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 3)		
Resume	Wapres Jusuf Kalla mengingatkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar tidak antikritik saat menjalankan tugas pelayanan public.		

PELAYANAN PUBLIK

Wapres: ASN Jangan Antikritik

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar tidak antikritik saat menjalankan tugas pelayanan publik. Mereka yang mendapat kritik, terutama dari media massa, biasanya kerap melakukan kesalahan. Oleh karena itu, setelah diangkat menjadi PNS, aparatur sipil negara diharapkan tak melakukan kesalahan sekecil apa pun. Selain menjaga kedisiplinan, ASN juga diharapkan bekerja keras memajukan bangsa dan negara.

"Anda leluasa dikritik apabila berbuat keliru. Apabila Anda berbuat tidak sepatutnya (dengan sendirinya akan dikritik). (Juga) Apabila Anda tak berhasil, maka orang atau media akan mengkritik. Anda harus mengetahui hal-hal itu sehingga mempunyai kemampuan (untuk pelayanan)," kata Wapres Kalla saat memberikan kuliah umum di hadapan CPNS di Istora Senayan, Jakarta. Acara itu dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan 6.148 CPNS hasil seleksi 2019.

Menurut Wapres Kalla, tugas utama aparatur sipil negara (ASN) adalah melayani masyarakat. Namun, pelayanan yang diberikan tentu berbeda-beda dan sesuai tugas dan fungsinya. ASN yang ditempatkan sebagai seorang guru, misalnya, seharusnya mengajar serta mendidik generasi muda dengan baik. Sementara ASN di Kementerian Kesehatan diharapkan memberikan perawatan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan kesehatan.

Sementara seorang ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melayani dengan cara melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang baik. Khusus para ASN yang bertugas di bagian perizinan, Wapres Kalla meminta agar memberikan pelayanan dengan tak mempersulit masyarakat. Proses perizinan mesti dijalankan cepat dan tepat. "Percepat izin, percepat administrasi, dan percepat proses birokrasi di kantor masing-masing. Berprinsiplah, 'Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat.' Pokoknya, (pelayanan publik) harus dipercepat," ujar Wapres Kalla menegaskan.

Lebih jauh, para CPNS diingatkan untuk meninggalkan budaya ingin selalu dilayani seperti pada masa lalu. Kini, tak boleh lagi ASN dimanjakan dengan fasilitas dari negara.

Sementara itu, Syafruddin mengatakan, CPNS hasil seleksi 2018 akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya. (NTA)

Judul	RI-UEA Tanda Tangan 12 MOU	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 5)		
Resume	Beberapa kerja sama ekonomi yang ditawarkan, antara lain, pengembangan pariwisata Mandalika dan Danau Toba, serta proyek-proyek yang berkaitan dengan SDGs, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.		

KERJA SAMA BILATERAL

RI-UEA Tanda Tangan 12 MOU

BOGOR, KOMPAS — Sebanyak 12 nota kesepahaman ditandatangani dalam kunjungan kenegaraan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan ke Indonesia, Rabu (24/7/2019). Penandatanganan nota kesepahaman ini membuka potensi lebih banyak kerja sama ekonomi dan bidang lain untuk direalisasikan.

Dari 12 nota kesepahaman (MOU) itu, sembilan MOU dilakukan antarlembaga pemerintah, berkaitan dengan peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, konsuleran, serta kebudayaan.

Adapun tiga nota kesepahaman lainnya dilakukan antarperusahaan. Kerja sama pertama antara Pertamina dan Adnoc Group untuk pengembangan RDMP (*refinery development*

master plan) Balikpapan, rantai pasok terintegrasi, dan penyimpanan LNG. Kedua, kerja sama Mubadala Investment Company dan Chandra Asri Petrochemical untuk proyek *naphta cracker* dan *petrochemical complex*. Terakhir, kesepahaman PT Maspion dan DP World untuk kerja sama membangun pelabuhan peti kemas dan pengembangan kawasan industri di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi tiga kerja sama *B to B* itu mencapai 9,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 136 triliun.

Sembilan nota kesepahaman antarlembaga pemerintah yang ditandatangani, menurut Menteri Retno LP Marsudi, membuka potensi-potensi ekonomi untuk digarap lebih cepat. Beberapa kerja sama ekonomi yang ditawarkan, antara lain, pengembangan pariwisata Mandalika dan Danau Toba, serta proyek-proyek yang berkaitan dengan SDGs, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Mohamed bin Zayed tiba di

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat khusus B777 pukul 08.51. Ia dijemput Presiden Joko Widodo yang berjalan dari ruang tunggu VIP menuju tangga pesawat, keduanya bertemu dan langsung bersalaman. Keduanya menumpang mobil yang sama menuju Istana Kepresidenan Bogor.

Kunjungan Mohamed bin Zayed dinilai bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan pertama pemimpin UEA setelah 29 tahun. Sebelumnya, kunjungan terakhir pemimpin UEA dilakukan Presiden UEA Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, ayah Mohamed bin Zayed, pada 1990.

Kerja sama lain yang disepakati kedua negara dalam kunjungan ini adalah memajukan toleransi dan moderasi. Mohamed bin Zayed adalah salah satu tokoh yang mengutamakan toleransi di masyarakat. UEA juga mendedikasikan 2019 sebagai tahun toleransi. (INA)

Judul	Mafia Air Rugikan Petani	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 10)		
Resume	Sejumlah petani di Indramayu berebut air irigasi dengan membayar ke penjaga pintu air atau gagal panen. Praktik bertahun-tahun itu dibantah, petani dituding salah paham.		

Mafia Air Rugikan Petani

Sejumlah petani di Indramayu berebut air irigasi dengan membayar ke penjaga pintu air atau gagal panen. Praktik bertahun-tahun itu dibantah, petani dituding salah paham.

INDRAMAYU, KOMPAS — Dampak kerusakan infrastruktur pertanian saat kemarau di Jawa Barat kian terasa. Kondisi itu memicu praktik mafia air yang membuat ribuan hektar sawah tak terairi dan gagal panen.

Berdasarkan penelusuran Kompas, Senin hingga Rabu (22-24/7/2019), kerusakan infrastruktur pertanian terjadi dari Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon, daerah lumbung padi utama Jabar.

Di Indramayu, sejumlah pintu air pembagi air ke sejumlah kecamatan rusak, bahkan hilang. Itu terpantau di pintu air Sentolop, Bangodua. Tanpa pintu, air irigasi mengalir deras ke Kecamatan Losarang, Widasari, dan Jatibarang. Untuk ke Losarang, masih ada pintu air Gato di Kecamatan Cikedung.

Dari empat pintu air menuju Losarang di Gato, dua pintu tertutup balok kayu. Dua pintu lain hilang. Air pun terus mengalir ke wilayah Cikedung.

Di pintu air Krama, Cikedung, titik pembagian air akhir ke Losarang, dua pintu air tertutup rapat. Satu pintu lain digantikan tumpukan batang pohon pisang. Aliran air mengecil. Akibatnya, saluran irigasi tersier di Losarang mengering. Puluhan hektar sawah di daerah itu gagal panen. Tanahnya retak, terbelah.

Yanto (30), petani di Desa Santing, Losarang, mengalami gagal panen di sawah garapan seluas 2,8 ha. Harapan mendapat 16 ton gabah kering giling sirna. Padahal, sawah itu disewa Rp 40 juta per tahun. Modalnya Rp 10 juta untuk musim tanam kedua atau gadu keluar sia-sia. "Air irigasi tak sampai ke sawah," ujarnya. Jarak Bangodua ke Losarang sekitar 30 km.

Berdasarkan pembagian waktu gilir air, sejumlah desa di Losarang dijatah aliran air tiga hari tiga malam dalam 10 hari. Airnya dibagi dua dengan Kecamatan Kandanghaur. Di Desa Puntang, sawah hanya mendapat air 36 jam. Sawah jauh dari irigasi tersier tidak terairi.

"Padahal, kami sudah bayar ke penjaga air. Namun, kalau dari kecamatan lain uangnya lebih banyak, air juga lebih banyak," ujar Sin, petani Puntang.

Untuk dapat jatah air 36 jam,



KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHERI

Petani menggunakan mesin pompa air di saluran irigasi Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (22/7/2019). Kekeringan membuat petani menggunakan mesin pompa untuk menyedot air ke sawah. Ongkos produksi pun bertambah.

kata dia, petani di Puntang menyerahkan Rp 2 juta setiap gilir air. Setiap hektar sawah, petani dipatok Rp 100.000 sekali gilir.

Menurut Sin, hal serupa ada di lima desa lain. Setiap gilir, oknum penjaga pintu air dapat Rp 12 juta dari enam desa.

Memberatkan petani

Uang gilir air itu memberatkan, selain uang bensin untuk bahan bakar mesin pompa air. Jika musim tanam pertama atau rendeng petani menghabiskan Rp 5 juta untuk tanam per 7.000 meter persegi, saat musim gadu seperti sekarang biaya produksi jadi Rp 6,5 juta.

Kondisi itu sudah lebih dari 10 tahun sejak pintu air di Sen-

tolop, Gato, dan Krama rusak. Pintu air berupa balok dan kayu itu dibuka tutup manual. "Kami takut melaporkan karena dancam sawahnya tidak mendapat air. Lagi pula, mau melapor ke mana?" katanya.

Wani (39), petani di Desa Tegalsembadra, Kecamatan Balongan, juga membayar Rp 30.000 untuk petugas penjaga pintu air agar sawahnya terairi setiap masa gilir. Uangnya dikumpulkan ke petani lain.

Bupati Indramayu Supendi meminta Polres Indramayu menangkap tangan siapa pun yang memperdagangkan air irigasi, termasuk pegawai pemerintah. "Kalau oknum kami, jika ada yang menghambat gilir air,

akan saya tindak," katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu Takmid mengatakan, dugaan mafia air kesalahpahaman petani. "Ada petani tidak patuh pada jadwal gilir air. Seharusnya, air untuk daerah lain, tetapi petani yang bukan gilirannya masih mengambil air menggunakan pompa atau buat tanggul," ujarnya.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu Sutatang mengatakan, pihaknya mengusulkan perbaikan saluran irigasi, termasuk pintu air. Dengan perbaikan, mafia air diharapkan dapat dicegah.

Hal sama terjadi di Karawang. Di saluran irigasi sekunder di Kecamatan Majalaya, ke-

bocoran tampak di kanan-kiri dinding saluran dan membasahi bagian luar. Di beberapa titik, dinding saluran bolong dan ditambah tumpukan karung.

Akan tetapi, air tetap merembes mengalir ke arah saluran pembuangan menuju desa lain. Saluran yang membentang 3.000 meter itu melintas di empat desa, yakni Ciranggon, Lemahmulya, Majalaya, dan Bengle, Kecamatan Majalaya.

Asep Saepudin (38), Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Ciranggon, Majalaya, mengatakan, saluran di daerahnya rusak sejak 2015. Setidaknya, 200 ha sawah di desa itu terancam kekurangan air tiga tahun terakhir. (SEM/IKI/MEI)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri (kanan) dan Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).		

► **EVALUASI ARUS MUDIK LEBARAN**

Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri (kanan) dan Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan arus mudik Lebaran 2019.



Antara/Rivan Awal Lingga

Judul	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM: Swasta Bisa Berpartisipasi	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kalangan swasta berpeluang untuk tetap bisa berpartisipasi dalam pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) seiring dengan pembahasan Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang mengatur pengusahaan sumber daya air lebih ketat.		

► SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Swasta Bisa Berpartisipasi

Bisnis, JAKARTA — Kalangan swasta berpeluang untuk tetap bisa berpartisipasi dalam pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) seiring dengan pembahasan Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang mengatur pengusahaan sumber daya air lebih ketat.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, partisipasi swasta bisa dilakukan lewat kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Dia juga menekankan, perusahaan SPAM berbeda dengan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK).

"Sesuai dengan putusan MK [Mahkamah Konstitusi], izin hanya diberikan kepada BUMN, BUMD, atau bumdes. Tapi pada penyelenggaraannya tetap bisa kerja sama dengan swasta," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis* di Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut Basuki, pemerintah dengan Panitia Kerja RUU SDA memang berbeda tafsir terkait dengan kerja sama perusahaan SPAM. Oleh karena itu, pembahasan pasal-pasal yang mengatur kerja sama dengan swasta berlangsung alot.

Dalam draf RUU SDA pasal 51, izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari harus diberikan kepada badan usaha milik negara, daerah atau desa penyelenggara SPAM. Air minum yang dimaksud adalah produk air minum dari penyelenggaraan SPAM, bukan air minum dalam kemasan produk manufaktur.

Sementara itu, keterlibatan swasta dalam industri air minum bisa dilakukan lewat kerja sama dengan badan usaha milik negara, daerah, atau desa dengan jangka waktu tertentu. Kerja sama bisa dilakukan lewat pembentukan perusahaan patungan maupun partisipasi modal masing-masing pihak.

Basuki menambahkan, partisipasi swasta dalam perusahaan SPAM tetap diperlukan karena kapasitas anggaran negara terbatas. Dia menyebut, untuk menambah sepuluh juta sambungan baru dibutuhkan investasi hingga

Rp150 triliun.

Saat ini, akses air minum menjadi salah satu target rencana pembangunan jangka menengah. Dalam periode 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan akses air minum 100%. Namun, hingga 2018, realisasi akses air minum yang layak baru mencapai 73,6% dan pada akhir tahun ini diestimasikan naik menjadi 76,2%, atau jauh di bawah target.

Di lain pihak, Ketua Panitia RUU SDA, Lasarus mengatakan panja masih akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait penafsiran partisipasi swasta dalam perusahaan SPAM. Dia mengimbau, pihaknya tidak ingin ada *judicial review* saat RUU ini disahkan menjadi undang-undang.

Lasarus menambahkan, RUU SDA juga tidak membatasi perusahaan

AMDK oleh kalangan swasta. Dia menekankan, pengaturan SPAM berbeda dengan AMDK. "AMDK itu pasal 50. SPAM itu pasal 51. Masa swasta enggak boleh [punya usaha di AMDK] dan PHK karyawannya."

Selain pengaturan terkait dengan kerja sama SPAM, pembahasan RUU SDA juga cukup alot pada ketentuan pungutan penggunaan air. Lasarus menyebut, pungutan tersebut akan diatur dalam regulasi turunan, yaitu peraturan pemerintah.

Konsep pungutan akan mengacu pada biaya jasa penggunaan sumber daya air. "Jadi siapapun yang pegang izin, mau untung atau rugi, bayar. Skemanya nanti pakai skema pemerintah, biaya jasa penggunaan sumber daya air," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, penyusunan RUU Sumber Daya Air (SDA) ditunggu banyak pihak setelah pada 2015 lalu Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan UUD 1945.

PENJAMINAN PDAM

Di sisi lain, Kementerian PUPR menilai kapasitas keuangan PDAM bakal meningkat setelah pemerintah menerbitkan regulasi pemberian ja-

► Kerja sama bisa dilakukan lewat pembentukan perusahaan patungan maupun partisipasi modal masing-masing pihak.

minan dan subsidi bunga untuk perusahaan daerah air minum. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Presiden No. 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Basuki mengatakan, beleid tersebut bakal mendukung proyek kerja sama SPAM yang sedang dalam tahap persiapan. Dia mencontohkan, salah satu proyek KPBU yang bisa mendapat benefit dari regulasi tersebut yakni proyek SPAM Jatiluhur. "Jatiluhur kan KPBU, [Perum Jasa Tirta II] bilang gak bisa jamin kalau gagal bayar."

Dalam perpres tersebut, pemerintah pusat memberikan penjaminan 70% dari jumlah kewajiban pembayaran pokok PDAM yang telah jatuh tempo. Penjaminan hanya bisa diberikan kepada PDAM yang memiliki kinerja sehat selama dua tahun berturut-turut dan menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*). 

Proyek Air Minum Dapat Jaminan Pemerintah

I. Jaminan Pemerintah Pusat sebanyak 70% dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, dan sisanya sebanyak 30% dari pokok kredit menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi.

(1) Jaminan Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang:

- menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut; dan
- telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

(2) Terhadap PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam tahap restrukturisasi, juga wajib memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Terhadap PDAM yang menunjukkan kinerja kurang sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah, dan keuangan negara.

(5) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

II. Pemerintah Pusat menyediakan anggaran subsidi bunga selama jangka waktu kredit investasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM, ditetapkan sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 Bulan sebagai acuan suku bunga ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan;

- tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 Bulan ditanggung PDAM; dan
- selisih bunga di atas imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 Bulan paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46/2019 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

BISNIS/HUSIN PARAPAT

Judul	KELANCARAN JALAN TOL: Toko di Rest Area Bakal Ditutup	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Tempat istirahat dan pelayanan atau rest area di jalan tol sering dirasakan menjadi salah satu penyebab macet saat terjadi lonjakan trafi k misalnya mudik Lebaran. Hal ini mendorong pemerintah berencana untuk menutup toko kemersial di tempat itu.		

► **KELANCARAN JALAN TOL**

Toko di Rest Area Bakal Ditutup

Bisnis, JAKARTA — Tempat istirahat dan pelayanan atau *rest area* di jalan tol sering dirasakan menjadi salah satu penyebab macet saat terjadi lonjakan trafik misalnya mudik Lebaran. Hal ini mendorong pemerintah berencana untuk menutup toko kemersial di tempat itu.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada saat evaluasi penanganan arus mudik lebaran tahun 2019 yang dihadiri oleh sejumlah pihak yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan pihak terkait.

"Nantinya akan kita optimalkan pemanfaatan *rest area* tersebut. Ada 2 hal yang kami garis bawah, yang pertama memperpanjang jalan masuk ke *rest area*, kedua *rest area* kita fokuskan untuk istirahat sejenak dan diperbanyak toilet sementara dan menutup toko komersial agar pengguna *rest area* tidak berlama-lama di situ," ujarnya dalam rapat di Komisi V DPR tersebut, Rabu (24/7).

Penutupan toko komersial ini ditujukan agar pengemudi yang sedang beristirahat dapat bergantian dengan

pengemudi lainnya sehingga egunaan tempat istirahat tersebut bisa dinikmati oleh semua pengemudi.

Basuki menambahkan, bahwa penutupan toko komersial ini akan dilakukan pada saat musim lebaran, dan nataru (natal dan tahun baru) saja, dan tidak dilakukan secara permanen.

"Penutupan toko komersial ini ya mungkin untuk yang besar-besar pada saat itu hanya untuk mengatur supaya orang-orang tidak terlalu lama di *rest area*," katanya.

Menurut Basuki, hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut yang mana pihaknya akan mengupayakan supaya kebutuhan istirahat pengemudinya terpenuhi tetapi juga bisa bergantian dengan pengemudi yang lain.

Rencana tersebut sesuai dengan kajian Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan *rest area* di jalan tol tanpa berimbas pada kemacetan lalu lintas saat terjadi lonjakan volume kendaraan.

Instruksi yang disampaikan Menteri Perhubungan adalah *rest area* yang menawarkan layanan pengisian bahan bakar dan toilet tanpa kehadiran sentra makanan dan minuman.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mempertimbangkan rencana penutupan sejumlah *rest area* jalan tol yang dianggap menjadi pemicu kemacetan saat terjadi lonjakan kendaraan.

Sebagai informasi, jalan tol Trans Jawa telah tersambung sepanjang 1.000,7 kilometer, dengan 996 kilometer operasional dan 4,7 kilometer fungsional. Untuk tempat istirahat terdapat 78 *rest area* dengan rincian 34 *rest area* tipe A, 22 *rest area* tipe B dan 22 *rest area* tipe C serta yang masih tahap konstruksi.

Pada jalan tol Trans Sumatra sepanjang 503 kilometer, 281 kilometer operasional dan 222 kilometer fungsional terdapat 18 tempat istirahat pelayanan.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan bahwa penutupan toko komersial dan optimalisasi ini perlu dikaji ulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami lihat dengan capaian ribuan kilometer yang sudah tersambung, tentu pada saat arus mudik dan balik

perlu diadakan *rest area* khusus, karena kita tidak tahu secara psikologis animo para pengendara," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penataan ulang *rest area* ini perlu dikaji lebih lanjut agar semua pengemudi dapat menikmati fasilitas tempat peristirahatan tersebut serta dapat beristirahat secara cukup untuk melanjutkan perjalanan. "Jangan sampai kalau bergantian secara cepat nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Selain soal *rest area*, terdapat juga beberapa poin perbaikan ke depannya yang direkomendasikan oleh Kementerian PUPR di antaranya kemantapan jalan nasional akan terus ditingkatkan sehingga tetap menjadi alternatif rute yang aman, nyaman, selamat, dan efisien dari sisi waktu.

Juga peningkatan layanan transaksi di gerbang tol untuk menghindari kemacetan panjang seperti penambahan *mobile reader*. Berikutnya peningkatan kapasitas layanan di *rest area* yang sudah tersedia. Selain itu penerapan sistem informasi digital berbasis aplikasi telepon selular yang dapat terintegrasi dengan jalan tol. (Krisia Putri K.)

Judul	KEMBANGKAN TUJUH DESA WISATA: Pemprov NTT Bantu Bangun Cottage	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Pemprov Nusa Tenggara Timur pada tahun ini mendorong pengembangan pembangunan pondok wisata atau cottage di tujuh wilayah.		

► KEMBANGKAN TUJUH DESA WISATA

Pemprov NTT Bantu Bangun Cottage

Bisnis, DENPASAR — Pemprov Nusa Tenggara Timur pada tahun ini mendorong pengembangan pembangunan pondok wisata atau *cottage* di tujuh wilayah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Wayan Darmawa mengatakan pengembangan desa wisata dengan pendekatan kewilayahan ini mendapat dukungan dana provinsi untuk membangun tempat penginapan di tujuh destinasi.

"Pengembangan desa wisata ini untuk sementara menyoar Top 7 Pariwisata Estate dan ke depan akan dilanjutkan ke destinasi lainnya," katanya ketika dihubungi, Rabu (24/7).

Menurut Darmawa, lokasi destinasi desa akan dibangun secara terpadu untuk meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan *awareness*.

Dukungan dana provinsi sebesar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk membangun tiga pondok wisata atau *cottage*) masing-masing dengan empat kamar dan restoran ditujuh desa wisata tersebut.

Desa wisata yang akan membangun cottage tersebut yakni, *pertama*, Desa Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki atraksi wisata alam Air Terjun Oehala yang bertingkat-tingkat. Selain itu ada Kilo 12 yang mempunyai lokasi pemandangan lembah yang indah.

Kedua, Kampung Adat Lamalera,

Kabupaten Lembata yang memiliki keunikan sistem kekerabatan dan desa nelayan yang bertahan hingga kini. Atraksi wisata andalannya adalah perburuan paus yang sangat terkenal itu.

Ketiga, Mulut Seribu, di Kabupaten Rote Ndao yang memiliki objek wisata bahari yang menampilkan keindahan pemandangan alam gugusan pulau-pulau kecil.

Keempat, Pantai Liman yang terletak di Pulau Semau, di Kabupaten Kupang yang bisa ditempuh 30 menit perjalanan dengan perahu motor dari daratan Timor. Destinasi ini memiliki keindahan pantai alami dengan pasir putih bersih yang potensial dikembangkan dengan berbagai atraksi wisata.

Kelima, Desa Kaonara, Kabupaten Ende yang menjadi salah satu desa penyangga Kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan danau tiga warna. Desa ini juga memiliki panorama alam eksotik dan situs rumah adat unik.

Keenam, Desa Wolwal, Kabupaten Alor yang memiliki tiga potensi yakni gunung, laut, dan pantai yang memungkinkan dikembangkan menjadi wisata alam dan ekowisata yang memikat.

Ketujuh, Desa Praimadita, Kabupaten Sumba Timur yang sangat kental suasana adat istiadat dan memiliki bangunan unik yakni rumah adat beratap tinggi dan lancip serupa dengan menara yang banyak menyimpan benda-benda pusaka (Tunggu Merapu).

(Erna Sukarelawanto)

Judul	RUMAH SUBSIDI: Bank & Pengembang Minta Tambahan Kuota	Tanggal	Kamis, 25 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semakin menipis, membuat pengembang dan bank penyalur kredit berharap ada tambahan kuota.		

► RUMAH SUBSIDI

Bank & Pengembang Minta Tambahan Kuota

Bisnis, JAKARTA — Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semakin menipis, membuat pengembang dan bank penyalur kredit berharap ada tambahan kuota.

► Dengan menipisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pengembang masih bisa bergerak membangun rumah subsidi dari kuota yang masih tersisa.

Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Budi Satria mengatakan bahwa dari BTN dipastikan kuota FLPP segera habis. Budi mengatakan, bersama asosiasi pengembang sudah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar kuota FLPP dinaikkan. "Kuota tahun ini kurang lebih separuh dari tahun lalu, kami minta *disamain*. Kami minta supaya tahun ini ditambah sekitar 100.000-140.000 unit. Nah dari permintaan itu, Menteri sebenarnya menyambut baik, karena berarti minatnya tinggi," ungkapnya kepada *Bisnis*, Rabu (24/7).

Berdasarkan catatan, tahun ini anggaran untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan FLPP hanya 68.000 unit. Jumlah itu jauh dari tahun lalu yang total keduanya mencapai 280.000-an unit.

Dari hasil evaluasi triwulan kedua 2019, dana FLPP yang telah disalurkan kepada masyarakat sebanyak 46.174 unit (67%) dari target 68.858 unit.

Dari 39 bank pelaksana penyalur dana FLPP 2019 yang terdiri atas sembilan bank umum nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD), sebanyak 18 bank pelaksana mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50% dari kuota yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama operasional (PKO).

Saat ini, BTN bersama para asosiasi pengembang masih menantikan realisasi penambahan kuota FLPP dari Menteri Keuangan.

Budi menyebutkan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu keputusan Menkeu.

Dengan menipisnya kuota, Budi menye-

butkan, pengembang masih bisa bergerak membangun rumah subsidi dari kuota yang masih ada.

"Kita harapkan nanti ada *review* alokasi yang masih ada, yang memang belum habis, mudah-mudahan bisa dialirkan. Kasihan kan MBR yang membutuhkan rumah, jadi belum bisa terlayani. Kalau kemarin sih Kemenkeu bilangny mendukung sekali, kita tunggu saja hasilnya," sambungnya.

Menanggapi apakah memungkinkan BTN bisa menalangi terlebih dahulu FLPP tersebut, Direktur BTN itu menyebut tidak bisa melakukannya.

"Nanti salah kami. Itu kan subsidi pemerintah, pakai anggaran pemerintah, kita tunggu saja semoga bisa cepat diputuskan. Targetnya kami kan maunya kemarin, tapi ternyata kan masih harus nunggu Menkeu," ujarnya.

Senada, pengembang properti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perumnas juga masih menantikan tambahan kuota FLPP agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Pemasaran Perumnas Anna Kunti mengatakan bahwa pihaknya masih membangun hunian untuk MBR dengan kuota FLPP yang masih tersedia. Perumnas sendiri dalam pengembangannya mengalokasikan 20%—30% produknya untuk dijadikan hunian bagi MBR.

"Memang sudah sempat diskusi dengan BTN juga, untuk bulan Agustus kalau sudah ada kuota baru ya, harapannya kami bisa teruskan lagi pembangunan untuk MBR itu. Jadi sama-sama sekarang kami masih menghabiskan kuota yang ada," ungkapnya.

Sepanjang 2019, Perumnas menargetkan meraup pendapatan mencapai Rp2,5 triliun. Adapun, hingga Juli sudah terealisasi sampai Rp900 miliar. Anna mengatakan

hingga akhir tahun tetap optimistis untuk mencapai target.

"Masih banyak proyek kami yang bisa diandalkan terutama yang perumahan tapak baru saja dan baru mau di-*launching*. Porsinya dari pendapatan yang sudah ada 50:50 dari rumah tapak dan *high rise*," sambung Anna.

KEJAR TARGET

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, dengan alokasi dana FLPP yang menipis tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian program sejuta rumah yang tahun ini ditetapkan menjadi 1,25 juta hunian.

Pasalnya, pasokan dan permintaan rumah nonsubsidi termasuk pembangunan rumah secara swadaya masih banyak.

"Untuk rumah tapak masih ada berjalan pengembangan perumahan komunitas dan rusunawa, itu masih bisa menambah jumlah unit untuk PSR," jelasnya.

Hingga Juli ini, tercatat pencapaian Program Satu Juta Rumah sebesar 626.330 unit rumah atau sekitar 50% dari targetnya. Namun, PUPR yakin bisa mencapai target itu pada akhir tahun.

Adapun, untuk pengembangan perumahan komunitas, terdapat sejumlah pola yang diusung, yaitu ABCG (*Academy, Business, Community and Government*), seperti yang dilakukan di desa Curug, Kendal, atau pola BCG (*Business, Community and Government*), seperti pembangunan rumah PPRG (perkumpulan pemangkas rambut Garut) di Garut.

Selain itu, ada pula pola CG (komunitas dan pemerintah), di mana komunitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki lahan bersama atau tanah penda dibantu PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). □

FLPP Menipis, Target Tetap Dikejar

